IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMIC COVID-19 DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu (S.Sos)

Dalam Bidang Ilmu Poltik

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh :

Diana Permatasari Oktaviani (I71217028)

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

JUNI 2021

PERNYATAAN

PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diana Permatasari Oktaviani

NIM : I71217028

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : **Implementasi Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar- benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya 21 Juni 2021

Yang menyatakan

Diana Permatasari Oktaviani

NIM: I71217028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama :Diana Permatasari Oktaviani

NIM :I71217028

Program Studi :Ilmu Politik

Yang berjudul "**Implementasi Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya**", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat di ajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S.Sos dalam bidang ilmu politik.

Surabaya, 21 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Dr. H. Ahmad Suyuthi, M.Ag, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Diana Permatasari Oktaviani dengan judul "**Implementasi Bantuan Sosial Tunai Dimasa Pandemic Covid-19 Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim penguji skripsi tanggal

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. H. Ahmad Suyuthi, M.Ag, M. Si

NIP. 197407212006041001

Penguji II

Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag, M. Si

NIP. 197411102003121004

Penguji III

Dr. H. M. Ismail, S.Sos, M.H., M.Si

NIP. 196005211986081001

Penguji IV

Muchammad Ismail, S.Sos, MA

NIP. 198005032009121003

Surabaya,

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof Akh. Muzakki,M.Ag, Grad.Dip.SEA,M.Phil,Ph.D

NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diana Permatasari Oktaviani
NIM : I71217028
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik
E-mail address : Dpo201099@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMIC COVID-19 DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Desember 2021

Penulis

( )
Diana Permatasari Oktaviani

ABSTRAK

Diana Permatasari Oktaviani, 2021, Implementasi Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya, skripsi Program studi Ilmu Politik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan sosial tunai.

Kebijakan bantuan sosial ada beberapa bentuk ada bantuan sosial tunai, bantuan berupa sembako dan program keluarga harapan bantuan-bantuan ini pasti memiliki tujuan yaitu membantu mensejahterahkan masyarakatnya dan focus utama pada skripsi ini yaitu kebijakan bantuan sosial tunai dan bantuan itu berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000 yang diberikan secara langsung di kantor pos yang terpiih dimasing- masing kelurahan.

Lalu Penelitian tentang Implementasi Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan Semampir Kota Surabaya bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi bantuan social tunai dan menganalisis factor- factor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan bantuan social tunai di kecamatan Semampir.

Penelitian menggunakan metode kualitatif kerena pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam melihat fenomena yang terjadi pada implementasi kebijakan public menurut Van Metter dan Carl Van Horn.

Implementasi dari bantuan social tunai ini berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian data, pembagian kartu, pencairan dana dan pembuatan laporan. Factor pendukung dari keberhasilan terdapat pada pencairan dana dengan sumber daya manusia yang cukup menjadikan penyaluran dana terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan factor penghambat dari implementasi tersebut pada terletak pada sosialisasi yang tidak merata jadi ada warga yang tidak mendapat bantuan sosial tersebut .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
PERNYATAAN vii
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
LAMPIRAN-LAMPIRAN xiv
Daftar gambar xv
Daftar Tabel xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Rumusan Masalah** 4
- **C. Tujuan Penelitian** 4
- **D. Manfaat penelitian** 4
- **E. Definisi konseptual** 5
  - **1. Implementasi** 5
  - **2. Kebijakan Publik** 5
  - **3. Implementasi kebijakan** 5
  - **4. Kebijakan sosial** 6
  - **5. Bantuan sosial Tunai** 6

BAB II 7
KAJIAN TEORITIK 7
- **A. Penelitian terdahulu** 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kajian Pustaka 9
1. Implementasi kebijakan 9
2. Kebijakan Sosial 19
3. Keputusan Menteri sosial Republik Indonesia No 54 tahun 2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penangan dampak corona virus Disease 2019 (covid-19) 22
4. Bantuan Sosial Tunai 26
C. Kerangka Berpikir 27
BAB III 30
METODE PENELITIAN 30
A. Pendekatan Penelitian 30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
C. Penentu Informan 31
D. Tahap- Tahap Penelitian 32
E. Jenis dan Sumber Data 33
F. Tekni Pengumpulan Data 34
G. Teknik Analisis Data 36
H. Teknik Pemerikasaan Kebsahan Data 37
I. Sistematika Pembahasan 37
BAB IV 39
HASIL DAN PEMBAHASAN 39
A. Penyajian Data 39
1. Gambaran Umum Kota Surabaya 39
2. Gambaran umum kecamatan Semampir 41
b. Letak Wilayah 41
c. Potensi Daerah 42
d. Sumber Daya Manusia 43
e. Angka Kemiskinan 44
f. Penyaluran BST 45
B. Data Fokus penelitian 45
1. Profil Instansi 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Implementasi bantuan sosial tunai 50

C. Analisis dan Pembahasan 56

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemic Covid -19 Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 56

2. Faktor Pendukung dan Penghambat 62

BAB V 64

PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

1. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN- LAMPIRAN 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.Pedoman Wawancara

2. Dokumentasi Penelitian

3. Surat Keterangan (Bukti Penelitian)

4. Biodata Peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar gambar

Gambar 2. 1 turunan implementasi kebijakan..... 13
Gambar 2. 2manajemen sector public..... 14
Gambar 2. 3 langkah- langkah implementasi kebijakan 15
Gambar 2. 4 tujuan kebijakan sosial 21
Gambar 2. 5 Kerangka teori…….…….27
Gambar 4. 1 peta kecamatan semampir 42
Gambar 4. 2 struktur dinas sosial..... 48
Gambar 4. 3 Struktur PT Pos 49
Gambar 4. 4 struktur kecamatan. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Tabel

Tabel 2 1 penelitain terdahulu 7
Tabel 2. 2 Manajemen Implementas……..……16
Tabel 4.1Luas Daerah Menurut Kelurahan Di Kecamatan Semampir 2019 41
Tabel 4 2 jumlah RT RW Mnurut kelurahan 2019 42
Tabel 4.3 jumah penduduk……...……..43
Tabel 1 4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan Semampir Menurut Jabatan Dan Jenis Kelamin , Desember 2019 43
Tabel 1 5 Banyaknya Gangguan Keamanan Menurut Jenisnya Di Kecamatan Semampir 2019 44
Tabel 1 6 jumlah penerima bantuan sosial tunai di kecamatan semampir..... 45
Tabel 1 7 Deskripsi informan..... 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 banyak sekali negara yang terkena wabah dari virus corona termasuk negara Indonesia, karena adanya sebuah wabah penyakit ini banyak sekali dampak yang terjadi di masyarakat khususnya dampak ekonomi yang menjadikan tingkat kemiskinan semakin tinggi dan pengeluaran pemerintah pun semakin banyak karena pengeluaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial, salah satu program pemerintah yaitu bantuan sosial tunai yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Dalam program bantuan sosial tunai pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan supaya bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

Berbicara tentang kemiskinan di indonesia pada badan pusat statistic (BPS) persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen point terhadap maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2020, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, menigkat 1,13 juta orang terhadap maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2020, persentase miskin perkotaan pada maret 2020 sebesar 7,38 persen naik menjadi 7,88 persen pada September 2020 sementara persentase penduduk miskin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedesaan pada maret 2020 sebesar 12,82 persen naik menjadi 13,20 persen pada September 202, jumlah penduduk miskin September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020) sementara itu jumlah penduduk miskin diperdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020).

Pada badan Pusat Statistik 2020 di Jawa Timur jumlah kemiskinan pada tahun 2017 yaitu 4.617,01 dengan persentase 11,77 persen lalu pada tahun 2018 menjadi 4.332,59 denan persentase 10,98 persen dan pada tahun 2019 jumlah kemiskinan yaitu 4.112,25 dengan persentase 10,37. Sedangkan kemiskinan ditingkat kota Surabaya pada tahun 2017 yaitu berjumlah 154,71 dengan persentase 5,39 persen lalu pada tahun 2018 berjumlah 140,81 dengan persentase 4,88 persen dan pada tahun 2019 menjadi 130,55 dengan persentase 4,51 persen. [2]

Dalam penelitian ini mengambil satu wilayah yang menjadi salah satu kecamatan miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah di kota Surabaya yaitu kecamatan semampir hal ini dikarenakan factor dari urbanisasi dari utara kota Surabaya, para pendatang tertarik pada kawasan semampir ini karena di kecamatan semampir memiliki peran penting dibidang pelayanan pergudangan dan perindustrian yang membuat tingkat perekonomian semakin tinggi, tingginya tingkat perekonomian membuat

[2] Badan pusat statistic dalam angka 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin padatnya kawasan kecamatan semampir karena banyaknya para pendatang yang mencoba peruntungan bekerja di kawasan semampir.[3]

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah dengan dimunculkan sebuah program bantuan sosial untuk masyarakat diharapakan program tersebut bisa membantu memperbaiki perekonomian di Indonesia khususnya pada kecamatan semampir

Bantuan sosial tunai ini adalah sebuah program dari kebijakan pemerintah yang terdapat pada kepetusan Menteri No 54 tahun 2020 tentang pelaksaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Covid-19.

Karena itu peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan bantuan sosial tunai mulai dari sosialisasinya bagaimana, verifikasi datanya, pembagian undangan dari kantor pos seperti apa prosesnya, pencairan dananya serta pelaporannya semua bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut yang menjadi focus penelitian semua akan dijelaskan pada skripsi ini.

[3] Riza Normanda dan Dian Rahmawati ST,MT, "Identifiksi Faktor Penyebab Kemiskinan Kota Di Kecamatan Semampir Surabaya" *„Jurnal Teknik POMITS Vol. 2, No. 1, (2013).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan bantuan social tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan Semampir kota Surabaya.
2. Factor- factor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan bantuan social tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan Semampir kota Surabaya.

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan didalamnya yaitu:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan bantuan social tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan Semampir kota Surabaya.
2. Menganalisis Factor- factor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan bantuan social tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan Semampir kota Surabaya.

D. Manfaat penelitian

Sebuah penelitian tentu mempunyai manfaat bagi pembaca mulai dari manfaat teoritis dan praktisnya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Menambah wawasan dan ilmu bagi para pembaca tentang bagaimana implementasi kebijakan bantuan social tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan Semampir kota Surabaya dan apasaja factor-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

factor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan bantuan social tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan Semampir kota Surabaya.

2. Manfaat praktis

Untuk bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut dalam bantuan social tunai.

E. Definisi konseptual

1. Implementasi

Implementasi dalam kamus webster (dalam wahab,1997;64) dirumuskan secara pendek bahwasannya mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal.[4]

2. Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Islamy,2001:17) yang dimaksud kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku untuk memecahkan sesuatu masalah tertentu.[5]

3. Implementasi kebijakan

Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa implementasi kebijakan menurut mereka dimaknai dengan beberapa kata kunci yang

[4] Drs. Solichin Abdul Wahab, M.A*., Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*,edisi 2(Jakarta:Bumi Aksara,2001).
[5]Drs. M, Irfan Islamy, MPA, *Prinsip- Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),hlm 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama untuk menjalankan sebuah kebijakan, untuk melengkapi sebuah janji- janji dari sebuah kebijakan, untuk menghasilkan out put dari sebuah tujuan kebijakan , untuk menyelesaikan misi yang seharusnya diwujudkan dalam sebuah tujuan kebijakan.[6]

4. Kebijakan sosial

menurut Marshall yaitu sebuah kebijakan dari pemerintah yang berhubungan dengan suatu tindakan yang mempunyai dampak secara langsung terhadap suatu kesejahteraan masyarakat disuatu negara melalui penyediaan pelayaan sosial atau bantuan berupa keuangan.[7]

5. Bantuan sosial Tunai

Bantuan sosial tunai merupakan varian dari jarring pegaman di negara maju, mencakup 80 persen dari polulasi negara- negaraindustri menurut data ILO. Hanya sedikit sekali program bantuan tunai dilaksanakan dinegara- negara berkembang dan hanya memberikan bantuan yang minim. Bantuan sosial tunai adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan berupa bantuan langsung berupa uang tunai [8]

[6] Erwan Agus Prwanto, Ph.D, Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si, "*Implementasi Kbeijakan Publik*" , (Yogyakarta: Gava Media,2015),20.
[7] Edi Suharto, P h D, "*Analisis Kebijakan Publik*", (Bandung: ALFABETA,2020),14.
[8]Dr. Sarpano, M.Sc., *Bantuan Sosial Tunai kementerian Sosial bagi kelarga terdampak Cocid-19,* (Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial,2020), Hlm.18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian terdahulu

Dalam penulisan skripsi, peneliti menggali informasi dan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai perbandingan , baik kekurangan maupun kelebihan. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku , skrips, jurnal dan sarana literature yang serupa dalam rangka memperoleh informasi yang ada sebelumnya.

Tabel 2 1 penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul peneliti	Hasil penelitian
1	Hasbi Iqbal	Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai tahun 2008 di kabupaten kudus (universitas Diponogoro semarang,2008)	Adanya penolakan program bantuan sosial tunai, keterampilan para pelaksana yang harus ditingkatkan serta koordiinasi antara pelaksana program masih perlu dilegalkan dan sikap pelaksana yang kurang baik.
2	Dhila haryanti	Implementasi Bantuan Langsung tunai (BLT) di kecamatan Tanjung pinang Barat kelurahan bukit cermin kota tanjung pinang tahun 2012 (uniersitas maritime raja	Sosialisasi yang diberikan belum merata, pengawasan program belum berjalan dengan baik, belum adanya kerjasama antara berbagai pihak sehingga data yang didapat berbeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		haji Tanjung pinang,2015)	
3	Susi susanti	Implementasi intrusksi presiden republik indonesia nomor 3 tahun 2008 tentanf pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di kelurahan Sambutan kecamatan Sambutan kota samarinda (ejournal.an.fisip-unmul.ac.id, 2016)	Keterkaitan para pihak pelaksana seperti badan pusat sttistik (BPS), PT pos indonesia dan kantor kelurahan yang saling bekerja sama satu sama lain dalam seluruh proses pelaksanaan bantuan langsung tunai dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban masing- masing instansi
4	Junaidi Kariono	Implementasi kebijakan pogram bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2008 di kabupaten aceh timur (universitas sumatera utara medan 2013).	Pelaksanaan program yaitu untuk mengatasi kemiskinan dan melihat proses mekanisme dalam mengimplementasikan tujuan dan target dari program penanganan kemiskinan.
5	Baso iping	Perlindungan sosial melalui kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) di era pandemic Covid-19: tinjauan prespektif ekonomi sosial	Pelaksanaan system perlindungan sosial telah dilakukan melalui program dan berjalan lama sejak orde baru, pada pandemic covid-19 pemerintah memberian bantuan dalam bentuk tunai yang diberikan kepada msyarakat terdampak,dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		(universitas ekasakti padang 2020)	segi sosial memicu gejolak konflik serta timbulnya korupsi.
6	Harinawati	Evaluation of the distribution of diret cash assistance (BLT) for the covid 19 pandemi period and the communication patterns of the task force (covid-19) in simpang keuramat district, nort Aceh (advences in social science, education and humanities research, Volume 495, 2020)	Bantuan lansung tunai pada kecamatan simpang keraumat sudah dilaksanakan periode 1 dan 2 namun bemum dilakukan penyaluran bantuan langsung tunai pada periode 3 dikarenakan menungu laporan pertanggung jawaban selesai. Pola komunikasi antara satgas covid yaitu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait.

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi kebijakan

Sejarah

Pemakaian sebuah istilah implementasi mulai muncul kepermukaan dari beberapa decade yang sudah berlalu. Yang pertama memakai istilah tersebut ialah Harold Laswell (1956). Sebagai seorang ilmuwan yang untuk pertama kalinya mengembangkan studi dibidang kebijakan public , Lawless menciptakan ide dari suatu pendekatan yang dia sebut sebagai pendekatan proses (*policy process approach*). Menurut pendapatnya, supaya ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa itu kebijakan public oleh karena itu kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

public tersebut di jelaskan menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu: agenda-setting, formulasi, legitimasi , implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi. Dari runtutan kebijakan itu terlihat secara jelas bahwa imolementasi hanyalah sebuah bagian dari satu tahao dari proses besar sebagaimana suatu kebijakan public di buat atau di rumuskan.[9]

Dalam hal ini Laswell tidak secara khusus memberikan penekanan terhadap suatu arti pentingnya implementasi kebijakan dari keseluruhan tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses atau pembuatan kebijakan , dan sejak waktu itu konsep implementasi setelah itu menjadi sebuah konsep yang sudah mulai dikenal dalam studi ilmu politik, ilmu administrasi public, dan yang paling khusus dalam studi ilmu kebijakan public yang mulai berkembang. Ada beberapa ahli yang kemudian layak dianggap sebagai seorang pioneer sebagai pengembang ilmu atau studi kebijakan public. Dari banyaknya nama tersebut yang paling pantas memiliki kontribusi yang bagus yaitu Jeffrey Presskan dan Aaron Wildavsky(1973). Hal tersebut dikarenakan keduanya yang secara ekspilisit menggunakan konsep implementasi untuk menerangkan fenomena kegagalan disuatu kebijakan dalam mencapai sasarannya. Perkembangan selanjutnya mulai bermunculan beberapa pakar yang ahli terhadap studi ilmu

[9] Erwan Agus , Ph.D, Dyah Rtih Sulistyastuti, M.Si, *Implementasi Kebiakan publik:Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta:Gava Media,2015), hlm.17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi yaitu: Van Horn dan Van Meter (1975), Teilmann (1980), Klein (1979), Berman(1978), serta Patton (1978).

Secara ontologis studi implementasi ialah atau yang dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan public, yaitu: (i) mengapa suatu kebijakan public gagal diimplementasikan disuatu tempat atau wilayah, (ii)mengapa sebuah kebijakan public yang sama yang dibuat oleh pemerintah memiliki keberhasilan yang masing- masingnya berbeda pada saat diimplementasikan di suatu tempat atau wilayah, (iii) mengapa sebuah macam kebijakan lebih mudah dibandingkan dengan macam kebijakan yang lainnya, (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran sebuah kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Schneirder (1982:718) sebagai salah seorang yang representasi para ahli, menyatakan ada lima factor yang dapat memepengaruhi keberhasilan sebuah implementasi, yaitu: kelangsungan hidup, integritas teori, cakupan atau ruang, kapasitas dan konsekuensi yang tidak di inginkan atau masalah.[10]

Dan sementara itu ada Sabatier (1986:268) menyatakan ada enam variable yang paling utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagal dari sebuah implementasi, enam variable

[10] *Ibid,*hlm18-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah:1.tujuan atau sasaran kebijakan nyata jelas dan konsisten, 2.dukungan dari sebuah teori yang kuat dalam merumuskan sebuah kebijakan, 3.dalam proses implementasi pasti memiliki dasar hukum yang memang jelas dan dengan begitu menjamin kepatuhan para pelaksana dilapangan dan kelompok sasarannya, 4.berkomitmen dengan keahliannya para pelaksana kebijakan tersebut, 5.dukungan dari para orang penting atau disebut dengan *stakeholder,* 6.stabilitas atau keseimbangan kondisi pada sosial, ekonomi serta politik.

Lalu Definisi atau makna dari Implementasi mulai mengalami perubahan seiring dengan perubahan atau perkembangan ilmu dari implementasi itu sendiri. Pressman dan Wildvavsky sebagai pelopor studi sebuah ilmu atau studi kebijkan memberikan definisi yang sesuai dengan waktunya atau dekadenya. Pemahaman dua orang ilmuwan tersebut tentang implementasi masih banyak terpengaruh oleh suatu paradigma atau pandangan dari dikhotomi administrasi politik. Menurut Pressman dan Wildavsky implementasi atau pelaksanaan dimaknai oleh berapa kata kunci yaitu sebagai berikut ini: untuk menjalankan suatu kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi sebuah janji yang sebagaimana ditulis dalam dokumen suatu kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan suatu out put atau biasa disebut dengan produk kebijakan yang sebagaimana tujuan dari kebijakan.(*to*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produce), untuk menyelesaikan misi yang memang harus di realisasikan dan diwujudkan dalam tujuan kebijakan [11]

Kejelasan Makna

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai suatu tujuan. Tidak lebih atau kurang untuk melakukan implementasi sebuah kebijakan publik, maka ada beberapa pilihan langkah yakni langsung melakukan implementasi dalam bentuk sebuah program atau yang melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari sebuah kebijakan public ini. Secara umum dapat digambarkan yakni seperti ini.

Gambar 2. 1 turunan implementasi kebijakan

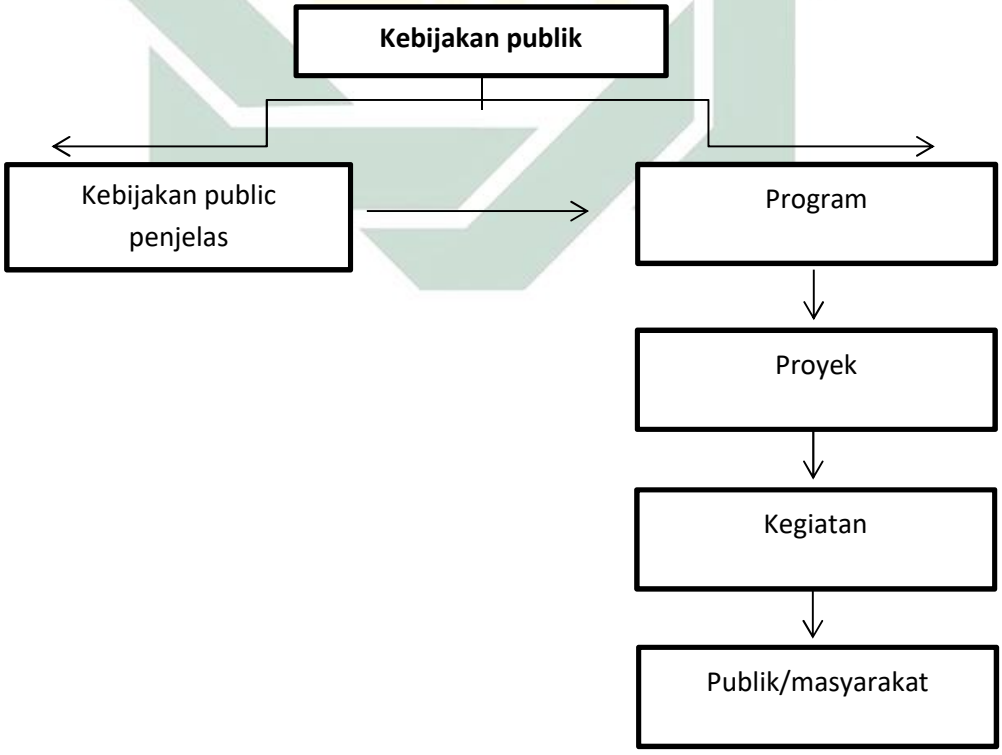

[11] Ibid, hlm.20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan public dalam suatu bentuk undang- undang atau peraturan daerah ialah jenis kebijakan public yang membutuhkan kebijakan public penjelas atau yang biasa disebut dengan istilah sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan public yang langsung bisa melakukan operasional yaitu keputusan presiden, instruksi presiden, Keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas dan sebagainya.[12]

Rangkaian dari sebuah implementasi kebijakan, dari gambar diatas dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari sebuah program, lalu ke proyek dan langsung ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi dari mekanisme yang biasa atau lazim di dalam sebuah manajemen sector public dan bisa dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2. 2 manajemen sector public

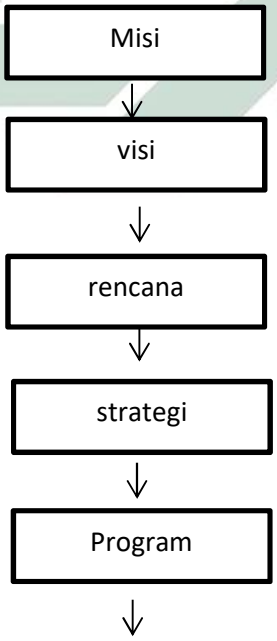

[12] Riant Nugroho D., *Kebeijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003),hlm.159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

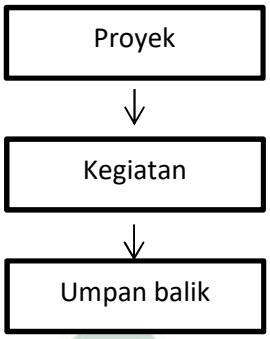

Dalam hal ini bisa dilihat bahwa tujuan dari sebuah kebijakan adalah melakuakan intervensi oleh sebab itu implementasi kebijakan sesungguhnya adalah sebuah tindakan intervensi itu sendiri. Mazmanian dan Sabatier (1983) memberikan sebuah gambaran yaitu bagaimana bisa melakukan intervensi atau implementas dari sebuah kebijakan dalam langkah- langkah yang beruntut sebagai berikut ini[13]:

Gambar 2. 3 langkah- langkah implementasi kebijakan

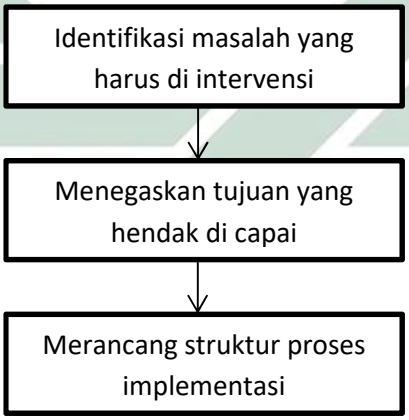

Implementasi atau pelaksanaan sebuah kebijakan didalam konteks menejemen berada dalam kerangka organizing- leading – controlling. Jadi pada saat kebijakan sudah dibuat maka tugas

[13] Ibid, hlm.161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan agar memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalaiaan pada pelaksanaan tersebut. secara terperinci kegiatan dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun beruntut sebagai berikut ini:[14]

Tabel 2 2 Manajemen implementasi

NO	Tahap	Isu penting
1	Implemetasi strategi (pra Implementasi)	Menyesuaikan stuktur dengan startegi
		Melembagakan strategi
		Mengoprasionalkan strategi
		Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2	Pengorganisasian (Organizing)	Desai organisasi dengan struktur organisasi
		Pembagian pekerjaan dan desai pekerjaan
		Integrase dan koordinasi
		Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia (recruiting dan staffing)
		Hak, wewenang, dan kewajiban
		Pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi)
		Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumberdaya manusia
		Budaya organisasi
3	Penggerakan	Efektivitas kepemimpinan

[14] Konsep ini banyak mengadaptas dari pemikirab James A.F. Stoner , R. Edward Freeman, dan Daniel R. Gilbert Jr (1996)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dan kepemimpinan	Motivasi
		Etika
		Mutu
		Kerjasama tim
		Komunikasi organisasi
		Negosiasi
4	Pengendalian	Desain pengendalian
		System informasu manajemen
		Pengendalian anggaran atau keuangan
		Audit

Model –Model Implementasi

Pada suatu prinsipnya terdapat dua pemilihan sebuah jenis model implementasi kebijakan. Pemeilihan yang pertama yaitu implementasi yang berpola "dari atas kebawah" (top bottomer) versus yang dari "bawah ke atas" (bottom-topper), dan pemilihan implementasi atau pelaksanaan yang berpola paksa (command-and-control) dan mekanisme pasar (economic incentive).[15]

Model yang mekanisme paksa ialah model yang selalu mengedepankan arti penting lembaga public sebagai lembaga tunggal atau utama yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa di dalam suatu negara dimana tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalankan, namun ada sanksi untuk yang menolak melaksanakan

[15] Ibid, hlm.165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau melalukan pelanggaran. Secara matematis model ini disebut dengan "Zero-minus model" dimana hanya ada nilai "nol" dan "minus" saja. Sedangkan model mekanisme pasar adalah model yang sangat mengedepankan mekanisme insentif bagi yang menjalankan, dan bagi yang tidak menjalankan tidak akan terkena sanksi namun karena itu tidak juga mendapat insentif. Tetapi ada sanksi yang menolak atau melakukan pelanggaran. Secara matematis model ini dapat disebut dengan "zero plus model", diamana yang ada hanya nilai "nol" dan "plus". Diantaranya ada kebijakan yang memberikan insentif dan memberikan sanksi. Model "top down" lebih mudahnya yaitu pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, di mana partisipasinya lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya "bottom-up" bermakna meski kebijakan yang mmebuat adalah pemerintah, tetapi pelaksananya yaitu rakyat dan dalam hal ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintag dengan masyarakatnya.[16]

Kebijakan Publik

Menurut William J. (1978) kebijakan public iaah sebuah serangkaian keputusan yang dibuat oleh seseorang actor atau kelompok actor politik yang berkenaan dengan tujuan- tujuan dan cara untuk mencapai sebuah tujuan dalam situasi tertentu yang dimana keputusan tersebut yang secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor tersebut dalam mencapainya.

[16] Ibid, hlm.167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi diatas dapat memaknai bahwa sebuah kebijakan public itu berisi sejumlah keputusan yang sistematis atau terangkai(tidak tunggal tetapi banyak keputusan dan tidak dapat dipisahkan), tujuannya sudah sangat jelas termasuk cara untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yang dibuat untuk merespon sebuah masalah yang terjadi pada saar situasi tertentu oleh seorang aktorpolitik (Eksekutif,legislative dan yudikatif, termasuk pula non pemerintah). Selalin tentang itu, juga dipertegas oleh William jenskin bahwasannya perumusan sebuah kebijakan itu dalam rangka merespon masalah sosial yang terjadi pada situsi tertentu sebuah permasalahan perlu diatasi lewat sebuah kebijakan public, dan masalah sosial yang strategis yang menyentuh kepentingan bersama atau orang banyak dan tingkat urgensinya sangat tinggi. Dan mereka yang mempunyai kewenaangan perlu segera membuat sebuah kebiajkan public untuk mengatasi masalah tersebut. misalnya kebijakan tentang "penanganan kemiskinan"[17]

2. Kebijakan Sosial

Pengertian

Kebijakan yakni prinsip atau sebuah cara bertindak yang telah dipilih untuk mengarahkan untuk pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang

[17] Prof. Dr. Muh. Irfan islamy, M.PA., *Kebijakan Publik* , (Banten: Universitas terbuka:2018), hlm.1.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku yang di cirikan oleh perilaku yang memang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun yang melaksanakannya. Sedangkan Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu prinsip yang mnegatur segala tindakn yang bermaskud diarahkan kepada suatu tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, maka sebuah kata sosial dapat di maknai baik secara generic atau luas maupun spesifi. Lalu yang secara generic, kata sosial merajuk pada pengertian umum di bidang atau sector pembangunan yang menyangkut sebuah aspek manusia dalam hal masyarakat atau koleftifitas. Dan istilah sosial dalam pengertian ini yaiu bidang pendidikan, kesehatan , politik, hukum dan budaya atau pertanian, sedangkan dalam arti sempit kata sosial yaitu kesejahteraan sosial yang pada bagian pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyatnya.

Lalu menurut Marshall,(1965)menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang terkait denfan segala tindakan yang mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan warga masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan berupa keuangan.

Sebagai suatu produk, kebijakan sosial merupakan hasil dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial mencakup segala bentuk peraturan, perundang- undnagan atau proposal program yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau proyek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai sebuah kinerja atau biasa disebut dengan perfoomance, kebijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil pengimplementasian produk suatu kebijakan sosial atau pencapaian tujuan suatu rencana pembangunan sosial.[18]

Tujuan Kebijakan Sosial

Dalam melihat konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial yaitu sebuah perangkat, mekanisme dan system yang tepat mengarahkan dan menerjemahkan tujuan sebuah pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi pada pencapaian sebuah tujuan sosial, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosialnya.

Gambar 2. 4 tujuan kebijakan sosial

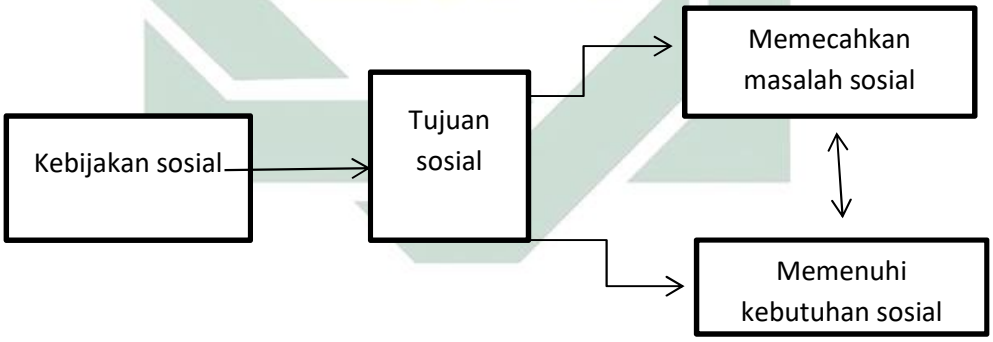

Tujuan pemecahan sebuah masalah mengandung makna yaitu mengusahakan atau mengadakan sebuah perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan contohnya yaitu kemiskinan. Sedangkan tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung makna yaitu

[18] Edi Suharto, P h D, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hm.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan pelayanan- pelayanan sosial yang memang sedang dperlukan.baik ada masalah ataupun tidak ada sebuah masalah dalam arti sebagai bentuk pencegahan[19]

3. **Keputusan Menteri sosial Republik Indonesia No 54 tahun 2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penangan dampak corona virus Disease 2019 (covid-19)**

   Menimbang

   a. Bahwa untuk melaksanakan jarring pengamanan sosial sebagaiamana diamanatkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang- undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan bagi masyarakat yang terdampak corona virus disease 2019 (COVID-19), perlu memberikan bantuan sosial semabko dan bantuan sosial tunai;
   b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusanmenteri sosial tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (COVID-19);

   Mengingat

[19] Ibid, hlm.84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Undang- undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (lembar negara republik Indonesia tahun 1984 nomor 20, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3273);
2. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang- undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang- undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 12, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4967);
5. Undang- undang negara nomor 12 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin (lembaran negara republic Indonesia tahun 2011 nomor 83, tambahan lembarannegara republik Indonesia nomor 5235);
6. Undang- undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan (lembaran nengara republik Indonesia tahun 2018 nomor 128, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6236);
7. Perturan pemerintah pengganti undang- undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk menangani pandemic corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian nasional dan/ atau stabilitas system keuangan negara (lembaran negara republik Indonesia nomor 6485);

8. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentanf penyelenggaraan kesejahteran sosial (lembaran negara republik Indonesia tahun 2012 nomor 68, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5294);
9. Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2013 tentang penanganan fakir miskin berdasarkan pendekatan wilayah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2013 nomorr 157, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5449)
10. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (covid-19) (lembaran negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 91, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6487);
11. Peraturan presiden nomor 46 tahun 2015 tentang kementeria sosial (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 86);
12. Peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (berita negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
13. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2018 nomor 33);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Peraturan presiden nomor 68 tahun 2019 tentang organisasi kementerian negara (lembaran negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 203);
15. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 (lemabaran negara republik Indonesia tahu 2020 nomor 94);
16. Keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019(covid-19) sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019(covid-19);
17. Keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (covid-19);
18. Keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional;
19. Peraturan menteri sosial nomor 20 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian sosial (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri sosial nomor 22 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturab menteri sosial nomor 20 tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang organisasi dan tata kerja kementerian sosial (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 1517).[20]

4. Bantuan Sosial Tunai

Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah dan rentan, berupa bantuan langsung atau tak langsung dan bantua langsung terdiri dari subsisdi, bantuan tunai, dana sosial, sedangkan bantuan tak langsung berupa pelayanan, rehabilitasi, perlindungan dan pemebrdayaan (Suryahadi, kusmawardhani & Ridho,2020).

Secara konseptual sebuah bantuan sosil dilakukan dengan maksud untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan begitu orang tersebut dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya, bantuan sosial bisa bersifat sementara karena situasi tertentu seperti bencana, atau memang adanya dari kebijakan tertentu dari pemerintah

Sehubungan dengan adanya wabah ini covid-19 yang melanda di Indonesia maka muncul keputusan menteri sosial no 54 tahun 2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak covid-19[21]

[20] Keputusan Menteri Sosial Nomor 54 Tahun 2020.
[21] Dr. Sarpano, M.Sc., *Bantuan Sosial Tunai kementerian Sosial bagi kelarga terdampak Cocid-19,* (Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial,2020),Hlm20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2 5 Kerangka Berpikir

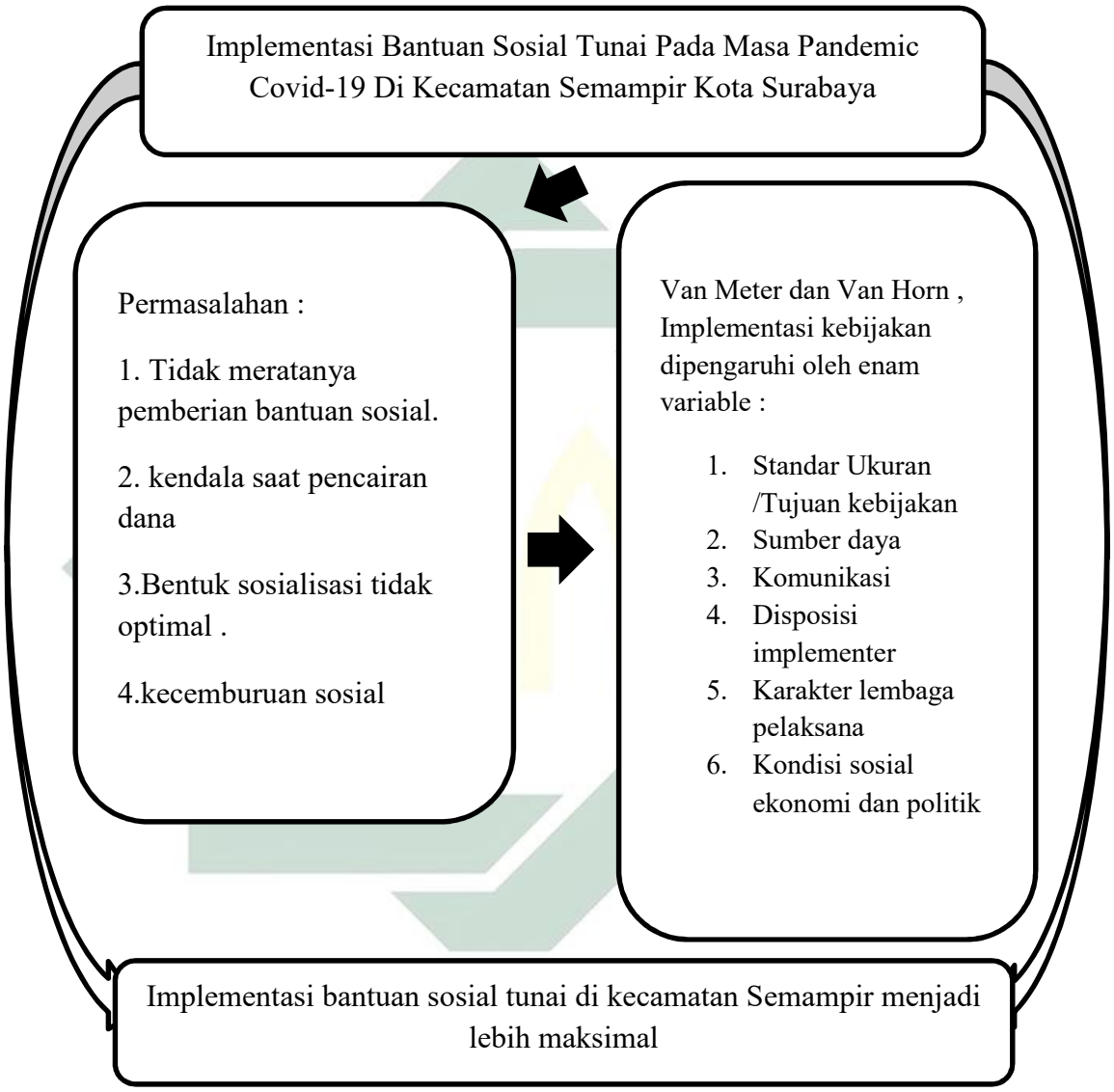

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah- masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bantuan sosial tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan semampir ini adalah

1. Tidak meratanya pemberian bantuan sosial mengakibatkan adanya kecemburuan sosial antar warganya.
2. Permasalahan dilapangan yang diakibatkan karena ada penerima manfaat salah jadwal dalam pengambilan maka bantuan tersebut tidak disalurkan.
3. Bentuk sosialisasi tentang bantuan sosial belum maksimal di lakukan mengakibatkan seseorang tidak mengetahui cara bila ingin mendapatkan bantuan sosial tersebut.
4. Kondisi sosial ekonomi di kawasan tersebut memang banyak yang mempunyai pendapatan yang rendah.

Dari bentuk permasalahan yang telah disebutkan diatas maka dibutuhkan suatu alat untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan semampir kota Surabaya sudah berjalan baik atau tidak, karena sebuah penelitian tidak menemukan titik terang atau membatasi analisis jika tidak diimbangi dengan teori yang berkaitan dengan masalah di lapangan, penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan public menurut donal van meter dan carl van horn yang dikutip dalam Leo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agustino terdapat enam variable mempengaruhi kinerja kebijakan public diantaranya:[22]

a. Standar/ ukuran tujuan kebijakan
b. Sumber daya
c. Komunikasi
d. Disposisi implementer
e. Karakter lembaga pelaksana
f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

[22] Leo Agustino, *Dasar- Dasar kebijakan Publik* (Bandung; Alfabeta,2009)hlm50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut pendapat dari Denzin & Lincoln (1994) berpendapat bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alaiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan diperbuat dengan melibatkan banyak macam metode yang ada. Erickson (1968) juga meyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan dengan cara naratif kegiatan atau tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan.

Dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya Termasuk dalam jenis penelitian kualitatif karena penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau metode kuantitaifikasi tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian di interpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman berkaitan dengan masalah- masalah dalam kehidupan social berdasarkan realitas atau bisa disebut dengan natural setting yang holistis, kompleks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan rinci. Dan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif karena mendeskripsikan fenomena yang ada .[23]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan lokasi yang sesuai dengan judul yaitu di kecamatan Semampir Surabaya dengan alasan kawasan tersebut yang termasuk kedalam kawasan miskin dan padat penduduk yang menjadikan kawasan Semampir seharusnya mendapat perhatian lebih dalam pelaksanaan dari kebijakan bantuan sosial tunai tersebut.

Dan dalam penelitian, peneliti menjadwalkan penelitian berlangsung pada bulan April sampai bulan juni 2021 terhitung 3 bulan.

C. Penentu Informan

Untuk mendapatkan data yang sesuai, maka penting ditentukannya seorang informan yang memiliki kompetensi dan tepat dengan kebutuhan data informan penelitian dipilih secara *purposive sampling. Purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan dari penelitian.[24] Arikuto menyatakan bahwa purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti saat peneliti mempunyai pertimbangan tertentu di saat melakukan pengambilan sampel.[25]

---

[23] Albi Anggito , Johan Setiawan, S.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat:CV Jejak), 2018, hlm7.
[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta,1983)hlm65.
[25] Asrof Syafi'I, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya:Elkaf.2005)hlm134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memilih dimana para informan merupakan seorang yang memberikan data sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.[26] Oleh karena itu pada penelitian ini sumber informasinya yaitu informan dan data serta masukan dalam menjawab penelitian. Dan informan yang relevan dengan penelitian ini yaitu kepala seksi kesejahteraan rakyat di kecamatan Semampir, kepala seksi penanganan fakir miskin di dinas sosial kota suarabaya dan pegawai perbantuan di Kantor pos serta beberapa warga di kecamatan semampir.

D. Tahap- Tahap Penelitian

Terdapat empat saat melakukan kegiatan penelitian secara umum. Kegiatan sebagai berikut, diantaranya yaitu:.[27]

1. Tahap Pra- lapangan meliputi hal yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan sesuatu yang perlu dipahami yaitu etika penelitian lapangan di kantor kecamatan Semampir dan kator Dinas sosial kota suarabaya. Penyusunan usulan penelitian dan seminar proposal penelitian lalu dilanjutkan dengan mengurus surat izin penelitian di kampus.
2. Tahap Pekerjaan lapangan, Yaitu dengan cara memahami latar penelitian yang akan diteliti, memperiapkan diri, memasuki lapangan, serta megambil peran sambal mengumpulkan data yang sesuai dengan focus penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai

[26] Jahaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung:Remaja Rodakarya, 2000)hlm36.
[27] Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2018) hlm127-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Implementasi tersebut memberikan gambaran tentang sosialisasi program, verivikasi data, pembagian kartu, pencairan dana dan pembuatan laporan.

3. Tahap Analisis Data, Melakukan pengelolahan data yang didapat memalui kegiatan observasi lapangan, wawancara dengan informan secara mendalam dan dokumentasi berupa foto. Lalu dilakukan pengecekan keabsahan data dengan mengecek sumber data dan metode dalam mendapatkan data yang sesuai dan valid. Hal terakhir dalam menganalisis data yaitu dengan menafsirkan data agar dapat dipahami oleh para pembaca.
4. Tahap Penulisan Laporan, pada bagian tersebut mencangkup kegiatan menyusun hasil penulisan dari awal sampai penafsiran data. Dan konsultasi dengan pembimbing sangat penting dilakukan untuk mendapat saran yang digunakan untuk memperbaiki sehingga mendapatkan hasil karya ilmiah yang lebih baik.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yaitu bagian sangat penting dalam penelitian. Jika terjadi kesalahan pada sumber maka dalam menggunakan atau memahami sumber data yang diperoleh tersebut juga akan meleset atau tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti wajib memahami sumber data yang harus digunakan dalam sebuah penelitiannya. Terdapat dua jenis sumber data yang biasanya digunakan oleh penliti dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber data primer dan juga smber data sekunder, berikut ini adalah penjelasannya:[28]

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yitu sumber data yang awalnya yang dimana sebuah data dihasilkan. Data yang didapat dari tokoh utama yang bersangkutan langsung dengan objek penelitian ini. Dalam hal tersebut yang menjadi sumber data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan pengurus atau staf di kecamatan, staf dinas sosial serta beberapa warga di kecamatan Semampir Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang kedua setelah sumber data yang pertama primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini yaitu data sekunder atau yang kedua. Sehingga dalam sumber ini yang dimaksud yaitu dokumen-dokumen yang diperoleh di kecamatan dan Dinas sosial kota Surabaya, serta dokumen- dokumen lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan untuk menguatkan data primer.

F. Tekni Pengumpulan Data

Sebuah data merupakan kunci utama dari suatu penelitian oleh karena itu ada teknik dalam mengumpulkan suatu data untuk melihat secara nyata suatu realita yang mencakup variable yang akan diteliti. Data yang didapat pada saat turun lapangan adalah hasil wawancara yang berupa rekaman , dokumentasi

[28] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: UNAIR Press,2001) hlm129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

foto dan catatan yang ditulis secara langsung pada saat wawancara saat bertanya kepada informan.

Metode atau teknik yang dipakai dalam peneltian ini adalah triangulasi menurut Sugiyono (2011) yang mencakup:

a. Observasi

Observasi diberlakukan untuk menjelaskan penelitian dengan cara melakukan pengamatan, melihat permasalahan yang terkait dengan pokok pembahasan yang ada. Observasi digunakan oleh peneliti ialah observasi non partisipan hal ini karena peneliti tidak terlibat untuk membantu pekerjaan dari dinas sosial kantor pos atau kecamatan di kecamatan Semampir kota Surabaya. Peneliti hanya melakukan pengamatan untuk melihat kondisi secara nyata dilapangan.

b. Wawancara

wawancara yakni teknik pengumpulan data yang diaplikasikan secara dua yang bersangkutan yang berguna untuk memberikan sebuah informasi dan pemikirannya dengan sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti dalam suatu topik permasalahan.

Teknik wawancara yang digunakan yani tekni wawancara mendalam. Yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan dengan cara tanya jawab secara langsung atau tatap muka dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narasumber.[29] Dan informan yang dipilih oleh peneliti yaitu kepala seksi penanganan fakir miskin di dinas sosial kota Surabaya, kela seksi kesejahteraan masyarakat kecamatan semampir, pegawai perbantuan kantor pos dan beberapa warga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni menyatukan suatu data degan catra mengambil data dari dokumen, maupun catatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.[30]

Data yang digunakan yaitu dokumentasi yang bertujuan untuk melihat kevalidan sebua data serta mengukur layak tidaknya sebuah data. Dalam hal tersebut dokumentasi yang didapat berupa dokumen atau sebuah arsip serta catatan yang ditulis pada buku peneliti, buku, surat, majalah dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

1. Data reduction (reduksi data)

   Data yang diperoleh dilapangan dengan jumlah yang cukup banyaj, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.. untu itu perlu dilakukan analisis- analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan pola. Denan demikian data telah di reduksi akan memberikan gambaran yan lebih jelas dan

[29] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011)
[30] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara,2003), hlm.143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display

   Teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti ialah penelitian deskkriptif kualitatif dengan menganalisis data yang sudah didapatkan setelah melakukan wawancara. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam teks penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[31]

H. Teknik Pemerikasaan Kebsahan Data

Dalam penelitian yang sudah dilakukan peneliti menggunakan teknik triangulasi yang berguna untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik triangulasi yakni sebuah teknik untuk memerikasa data dengan menggunakan data terkait dengan kenyataan yang diperoleh. Lebih jelas lagi penulisan akan meggunakan teknik umum yang biasa dipakai dari berbagai penelitian. Triangulasi data ini dipublikasikan dengan cara menghubungkan hasil wawancara yang didapat dengan data dokumentasi yang ada.[32]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang setiap babnya mengandung sub bab sebagai penjelas secara menyeluruh dari setiap babnya.

---

[31] http://Repository.unpas.ac.id.

[32] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kulitatif* (Bandung: PT remaja Rosdakarya,2006) hlm.324-330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama yakni pendahuluan yang berisikan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi konseptual dari sub bab tersebut dijabarkan secara keseluruhan oleh peneliti agar tau arah dari isi penelitiannya.

Bab kedua yakni Kajian Teoritik yang berisikan penelitia terdahulu, kajian pustaka serta kerangka berpikir, bab ini menjabarkan sebuah teori secara keseluruhan mulai dari implemetasi, kebijakan public, kebijakan sosial serta keputusan kementrian sosial No 54 tentang kebijakan bantuan sosial tunai.

Bab tiga yakni Metode Penelitian yang berisi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, penentu informan, tahap- tahap penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik analisis data , teknik pemerikasaan keabsahan data, serta sistematika pembahasan semua itu dijabarkan dibab ini secara jelas dan menyeluruh.

Bab empat yakni Analisis dan pembahasan yang berisi penyajian data, data focus penelitian dan analisis dan pembahasan semua data yang sudah diperoleh di jabarkan di bab ini secara keseluruhan dan jelas.

Bab lima yakni penutup yang berisikan kesimpulan dan saran peneliti dalam menanggapi permasalahan yag ada didalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kota Surabaya

Surabaya merupakan kota metropolitan sekaligus terbesar kedua di indonesia setelah DKI Jakarta. Surabaya berada dipinggir pantai yang menjadi jalur erlintasan ekonomi masyarakat dari berbagai daerah maupun wilayah. Sejak 1612, Surabaya menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi sehingga menjadi penghubung antar kota dan wilayah-wilayah penyongkongnya semakin bertambah baik dengan didukung transportasi yang mendukung seperti kereta api dan penggunaan kapal uap yang semakin banyak. Sejak zaman colonial, banyak orang eropa berdatangan ke Surabaya hal ini mengakibatkan munculnya bank, perusahaan asuransi yang, serta rumah-rumah dagang di Surabaya . Surabaya pun berkembang pesat begitupun dengan arus urbanisasi yang terjadi di kota Surabaya. Pertumbuhan penduduk yang tin ggi di Surabaya terdiri dari berbagai macam ras dan bangsa menjadikan Surabaya harus membangun pemukiman baru.[33]

[33] Endi Aulia Garadian, Pancaraga Surabaya tempo dulu: perjuangan kelas, simbolisme kota dan Fluktuasi ekonomi, *Jurnal Sejarah Vol. 1 (2), 2018 hlm.103-110*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Batas wilayah kota Surabaya

Batas- batas wilayah Surabaya terdiri dari di bagian utara terdapat selat Madura, dibagian selatan kabupaten sidoarjo, dibagian barat kabupaten gersik dan bagian timur selat Madura, kemudian untuk topografi Surabaya meliputi pantai, dataran rendah antara 3-6 m diatas permukaan laut, dan daerah berbukit di Surabaya berada di bagian selatan 20-30 m diatas permukaan laut.

Bagian utara :selat Madura

Bagian selatan :kabupaten Sidoarjo

Bagian timur :selat Madura

Bagian barat :Kabupaten Gresik

b. Jumlah penduduk kota Surabaya

Jumlah penduduk di wilayah kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun ketahun tercatat pada tahun 2019 penduduk kota Surabaya berjumlah 3.158.943 jiwa.[34]

Pada data badan pusat statistic 2020 menyatakan kemiskinan di kota Surabaya pada tahun 2017 berjumlah 154,71, lalu pada 2018 berjumlah 140,81 dan pada 2019 menjadi 130,55.

[34] Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Gambaran umum kecamatan Semampir

a. Letak geografis

Letak Geografis Kecamatan Semampir merupakan salah satu bagian dari 31 kecamatan yang ada di kota Surabaya, terletak di Surabaya Utara

Tabel 4 1 Luas Daerah Menurut Kelurahan Di Kecamatan Semampir 2019

Kelurahan	Luas (kilometer persegi)	Persentase terhadap luas kecamatan
(1)	(2)	(3)
Ampel	0.40	7,18
Sidotopo	0,55	9,87
Pegirian	0,66	11,85
Wonokusumo	1,40	25,14
Ujung	2,56	45,96
Kecamatan semampir	5,57	100,00

Sumber: Dari Badan Pusat Statistic Kota Surabaya Kecamatan Semampir Dalam Angka 2020[35]

b. Letak Wilayah

batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Pulau Madura

Timur : Kecamatan Kenjeran

Selatan: Kecamatan Simokerto

[35] Badan Pusat Statistic Kota Surabaya Kecamatan Semampir Dalam Angka 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barat : kecamatan Pabean cantina

Gambar 4. 1 peta kecamatan semampir

c. Potensi Daerah

Wilayah semampir menurut data kependudukan menempati urutan ke 3 penduduk terpadat di kota Surabaya setelah kecamatan tambaksari dan kecamatan sawahan. Yang mempunyai total RT sebanyak 561 dan RW sebanyak 70.

Tabel 4 2 jumlah RT RW Mnurut kelurahan 2019

Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
Ampel	86	17
Sidotopo	96	12
Pegirian	95	11
Wonokusumo	168	16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ujung	116	14

Sumber: Dari Badan Pusat Statistic Kota Surabaya Kecamatan Semampir Dalam Angka 2020[36]

d. Sumber Daya Manusia

Yang menjadikan potensi sumber daya manusia dapat dijadikan dasar bagi upaya mempertahanakan standar kesejahteraan yang telah dicapai warganya maupun bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun kehidupan pada taraf yang lebih baik pada wilayah kecamatan Semampir yang terdiri dari 561 RT, 70 RW dan % LKMK.[37]

Tabel 4. 3jumlah penduduk 2019

No	Kelurahan	Jumlah
1	Ampel	21.429
2	Sidotopo	36.073
3	Pegirian	35.272
4	Wonokusumo	76.407
5	Ujung	37.268

Tabel 4 4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan Semampir Menurut Jabatan Dan Jenis Kelamin , Desember 2019[38]

Jabatan	Laki-laki	Desember 2019 Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(04)
Fungsional	-	-	-
Fungsional tertentu	-	-	-
Fungsional/staf	23	8	31

[36] Badan Pusat Statistic Kota Surabaya Kecamatan Semampir Dalam Angka 2020
[37] https://www.e-semampir.com
[38] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Structural	-	-	-
Eselon V	-	-	-
Eselon IV	21	10	31
Eselon III	1	1	2
Jumlah	45	19	64

Sumber: Dari Badan Pusat Statistic Kota Surabaya Kecamatan Semampir Dalam Angka 2020

e. Angka Kemiskinan

Tabel 4 5 Banyaknya Gangguan Keamanan Menurut Jenisnya Di Kecamatan Semampir 2019[39]

Jenis gangguan	Jumlah
Pembunuhan	-
Penganiayaan	1
Perampokan	-
Pencurian	23
Penipuan	3
Penculikan	-
Perjudian	4
Pemerkosaan	-
Pengrusakan	-
Penggelapan	1
Penyalahgunaan narkoba	32
Lainnya	1
Kecamatan semampir	65

[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Dari Badan Pusat Statistic Kota Surabaya Kecamatan Semampir Dalam Angka 2020

f. Penyaluran BST

Penyaluran Bantuan sosial tunai dikecamatan semampir yaitu sebanyak 15.171 keluarga penerima manfaat bulan april 2021

Tabel 4. 1 jumlah penerima bantuan sosial tunai di kecamatan semampir

No	Kelurahan	Waktu	Jumlah
1	Ampel	16 April 2021	1248
2	Pegirian	20 April 2021	2925
3	Wonokusumo	18 April 2021	6350
4	Sidotopo	16 April 2021	2202
5	Ujung	15 April 2021	2446

Sumber dari kecamatan (nonpublish)

B. Data Fokus penelitian

1. Profil Instansi

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan dari beberapa orang pelaksana program dan masyarakat yang terkait dengan implementasi kebijakan bantuan sosial tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan semampir kota Surabaya. Deskripsi informan terlihat pada tabel ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4 2 Deskripsi informan

No	Informan	Jumlah
1	Dinas sosial	1
2	Kantor pos	1
3	Kecamatan	1
4	Kelurahan	2
5	RT	2
6	Warga	3
Total		10

a. Dinas Sosial kota Surabaya

Dinas sosial dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah tanggung jawab kepada walikota melealui sekretariis daerah.

Adapaun susunan organisasi dinas yaitu:

1. Kepala dinas
2. Sekretaris, membawahi:

   Sub bagian umum dan kepegawaian

   Sub bagian keuangan
3. Bidang bina sosial keagamaan dan perlindungan sosial membawahi:

   Seksi bina sosial keagamaan

   Seksi perlindungan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bidang rehabilitasi sosial, membawahi:

   Seksi rehabilitasi anak dan tuna sosial

   Seksi rehabilitasi daerah kumuh dan penyandang cacat

5. Bidang bina organisasi dan swadaya sosial, membawahi:

   Seksi bina organisasi sosial

   Seksi bina swadaya sosial

6. UPTD

7. Kelompok jabatan fungsional

Tugas dan fungsi

1.Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

2.Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

3.Pelaksanaan kebijakan sesusai dengan lingkup tugasnya

4.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5.Pelaksanaan administrasi dinas sesusai dengan lingkup tugasnya

6.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya[40]

[40] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4. 2 struktur dinas sosial

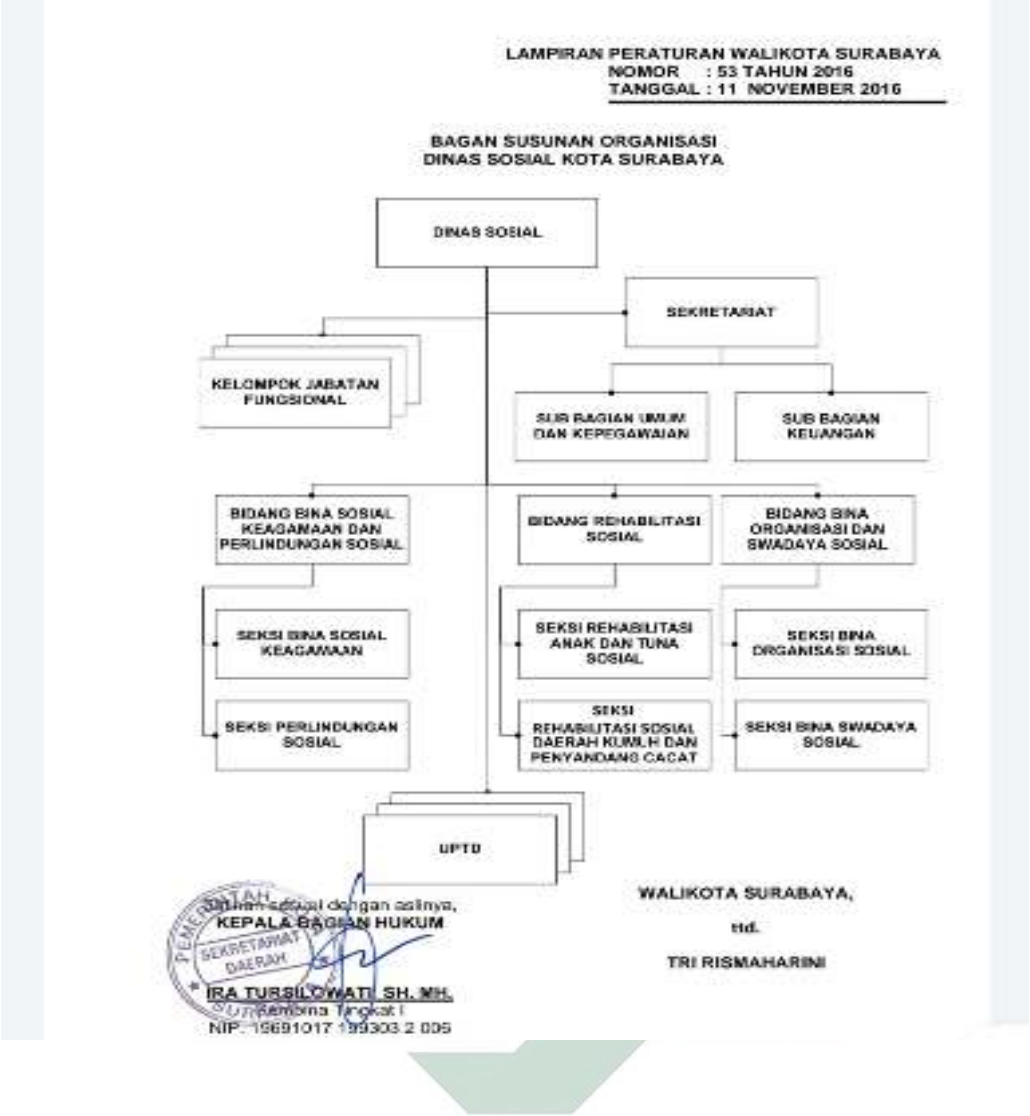

b. Kantor pos kebonrojo Surabaya

Kantor Pos pusat Surabaya kebonrojo terletak di Jl. Kebon Rojo No.10, Krembangan Selatan, kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa timur dengan kode pos 60175.

Tugas dari kantor pos dalam Kebijakan bantuan sosial tunai ini adalah sebagai penyalur dana atau pencairan dana secara tunai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tidak semua kantor pos yang menjadi penyalur hanya kantor pos terpilih saja yang menjadi penyalur dana bantuan.

gambar 4. 3Struktur PT Pos

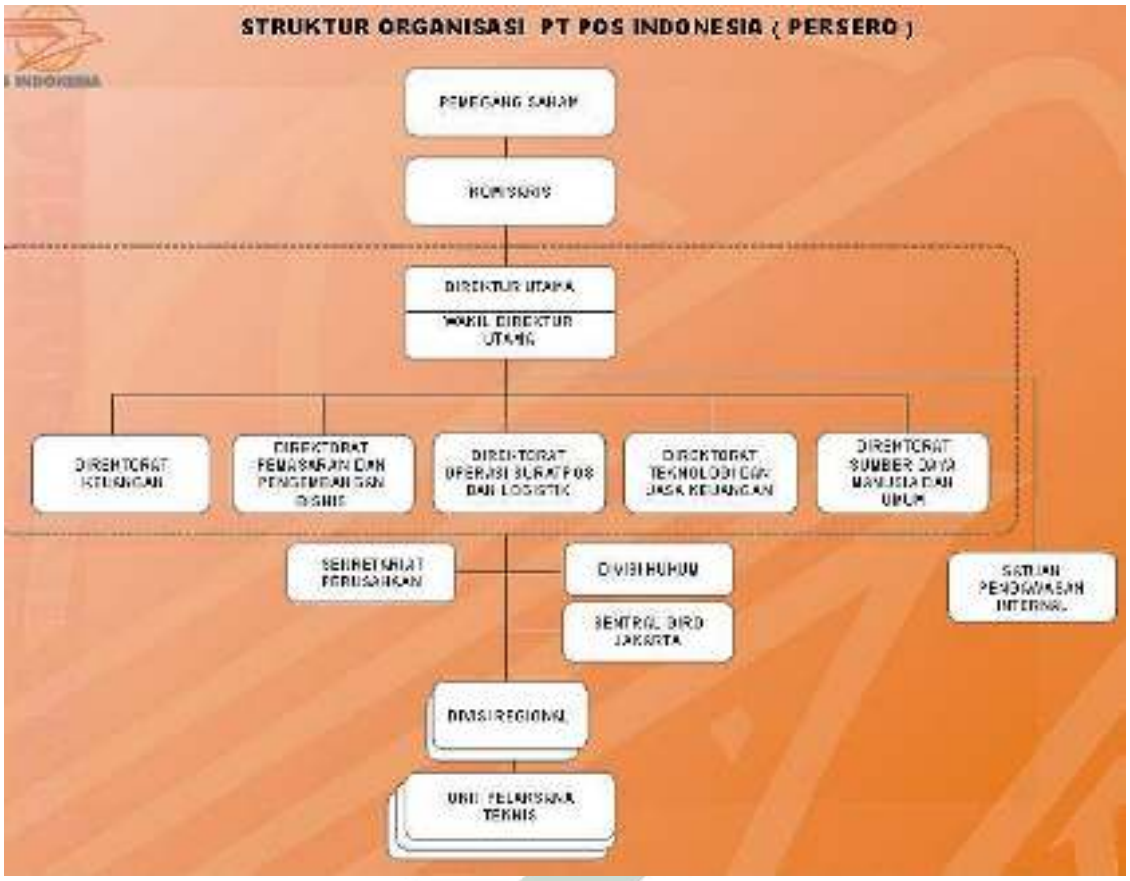

g. **Kecamatan semampir**

Yang berlokasikan di jalan Sultan Iskandar Muda No.16, Ujung, Semampir kota Surabaya dengan kode pos 60151.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian kewenangan pemerintah kabupaten di wiliyah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan,ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh walikota.

Gambar 4. 4 struktur kecamatan.

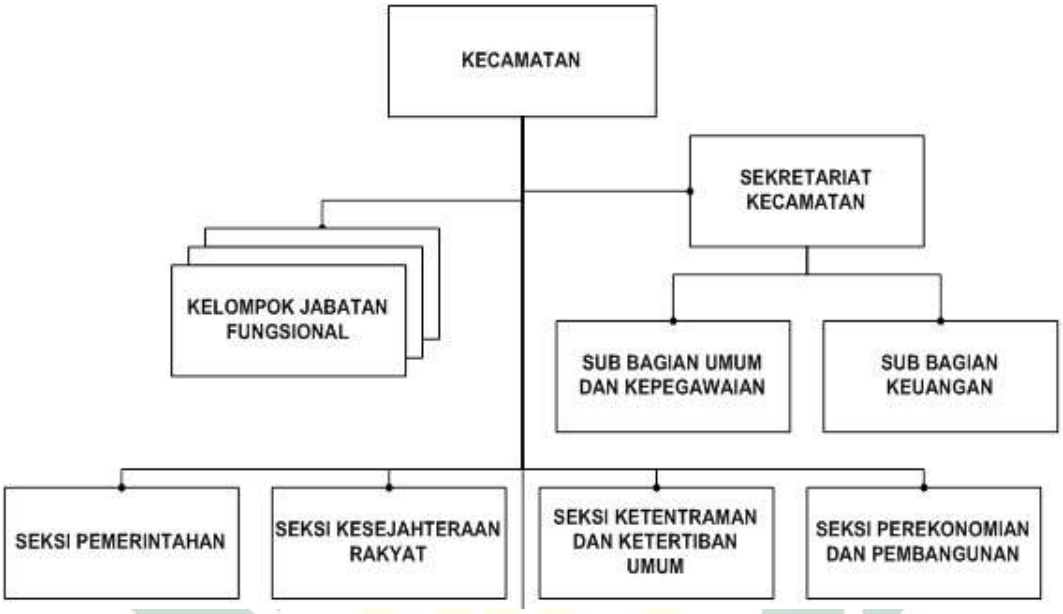

2. Implementasi bantuan sosial tunai

a. Sosialisasi

Sosialisasinya dilakukan dari tingkat instansi yang tinggi tingkat daerah antara dinas sosial kota surabaya, kantor pos serta kecamatan lalu dari tingkat kecamatan akan melakukan sosialisasi ke kelurahan yang dilakukan di kecamatan yang dihadiri oleh masing- masing perwakilan di kelurahan tersebut

Menyatakan:

> "bantuan sosial tunai ini langsung dari pusat yaitu kementerian sosial yang dananya disalurkan di kantor pos, berbicara mengenai sosialisasi pihak dinsos sebagai koordinasi bersama kantor pos lalu pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensosialisasikan ke masyarakatnya yaitu RW /RT. ”(informan 1,wawancara 14 juni 2021)[41]

“ada sosialisasi yang memang diadakan oleh dinsos yang menjadi leading sektornya dengan mengundang perwakilan dari kecamatan dan sosialisasi akan di lanjutkan dengan perwakilan kecamatan menyampaikan sosialisasi kepada kelurahan tersebut”(informan 2, wawancara 11 juni 2021)[42]

Lalu pernyataan dari warga ada dua yang menyatakan perbedaan yaitu mendapatkan sosialisasi dengan cara ketua RT datang kerumah dan memberikan informasi terkait mendapatkn bantuan sosial tunai dan yang warga lainnya tidak mendapatkan informasi apa- apa terkait bantuan sosial tunai.

Menyatakan

“saya taunya dari ketua RTnya yang datang kerumah mbak itu saya di infromasikan bahwa saya mendapatkan bantuan sosial tunai Rp.300.000”(infroman 4, wawancara 8 juni 2021)

b. Verifikasi Data

Dalam memverifikasi data yang sudah ada bisa dilihat data yang yang sudah terdaftar di DTKS data terpandu kesejahteraan sosial yang datanya berada di pusat

Menyatakan :

“Jelas ada verivikasi data supaya bantuan tepat sasaran, data pun harus sama dan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)”(informan 1 wawancara 14 juni 2021)[43]

[41] Edi siswanto, wawancara oleh penulis, 14 juni 2021
[42] Soedjatmoko Abipraja SE,MM, wawancara oleh penulis, 11 juni 2021
[43] Edi siswanto, wawancara oleh penulis, 14 juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan yang bertugas dalam melakukan verifikasi data dimasyarakat yang memang tidak mungkin instansi tertinggi datang satu persatu kerumah warga oleh sebab itu yang datang adalah ketua RT dimasing-masing wilayah yang turun untuk meminta data untuk dilakukannya verifikasi.

Menyatakan

> "yang bertugas melakukan verifikasi datanya yaitu RT dimasing masing wilayah yang disalurkan ke RW setelah itu menyetor ke kelurahan dan data diberikan ke kecamatan setelah itu dilihat apakah data sudah sesuai dengan data dari pusat saat data sudah cocok maka ia akan mendapatkan bantuan sosial"(informan 2, wawancara 11 juni 2021).[44]

c. Pembagian Undangan

Undangan yang berisi jadwal pengambilan serta barcode di buat oleh kantor pos yang disalurkan ke kelurahan masing- masing wilayah lalu kelurahan memberikan ke masing- masing RW yang kemudian di bagikan oleh ketua RT masing- masing wilayah.

Menyatakan:

> "sesuai dengan jadwal dari dinsos yang berkoordinasi dengan kantor pos dan yang membagikan kartu yaitu RW atau RT"(informan 2 wawancara 14 juni 2021"[45]

d. Pencairan Dana

Yang berhak mencairkan dana bantuan adalah pihak kantor pos dengan membawa undangan yang sudah diberikan pada masing- masing

[44] Soedjatmoko Abipraja SE,MM, wawancara oleh penulis, 11 juni 2021
[45] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima manfaat dan yang membuat jadwal pun dari pihak kantor pos itu sendiri

> "ada jadwal pencairan dana yang di tetapkan oleh pihak kantor pos informasi tersebut bisa dilihat di masing-masing kelurahan di kantor pos penerima bantuan sosial tunai akan menerima surat undangan dari pihak RT setempat dari undangan tersebut masyarakat diarahkan mengambil bantuan sosial ke kantor pos sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh kantor pos, undangan tersebut berisi barcode serta informasi dasar penerima bantuan dan wajib dibawa saat mengambil bantuan, setelah menunjukan undangan KTP/ KK petugas akan melakukan scanning barcode pada surat undangan, setelah itui maka dana bantuan sosial cair (informan 1 wawancara 14 juni 2021)[46]

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari pihak nator pos yang memberikan informasi cara melakukan pencairan dana

Menyatakan:

> ":saat penerima manfaat datang ke kantor pos, merka akan datang kepetugas yang akan memverifikasi datanya lalu mendapatkan nomor danom yang disamakan di masing-masng loker jadi setiap loker tersebut terdapat petugas yang menangani -+ 300 penerima manfaat, saat dipanngil sesuai dengan nomornya yang bersangkutan datang membawa undangan KTP / KK asli yang tidak boleh diwakilkan, setelah itu keluarga penerima manfaat tersebut kebagian pencairan dana lalu mendapatkan dana bantuan.(informan 3,wawancara 9 juni 2021)[47]

e. Pelaporan Kegiatan

Setiap pelaksana pasti membuat laporan yang harus di setorkan kepusat untuk menjadi bahan evaluasi disetiap kegiatannya

Menyatakan :

[46] Edi siswanto, wawancara oleh penulis, 14 juni 2021
[47] Bella Fitriyani, wawancara oleh penulis , 9 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "kecamatan memonitoring saat adanya pembagian bantuan tersebut dan bentuk laporannya berupa dokumentasi dan laporan data sesuai dengan dilapangan" (informan 2 wawancara 11 juni)[48]

Penyaluran Bantuan sosial tunai dikecamatan semampir yaitu sebanyak 15.171 keluarga penerima manfaat bulan april 2021.

Table 4.8 jumlah penerima bantuan sosial tunai di kecamatan semampir

No	Kelurahan	Waktu	Jumlah
1	Ampel	16 April 2021	1248
2	Pegirian	20 April 2021	2925
3	Wonokusumo	18 April 2021	6350
4	Sidotopo	16 April 2021	2202
5	Ujung	15 April 2021	2446

Sumber dari kecamatan (nonpublish)

3. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan

Karena tidak adanya sosialisasi yang jelas kepada warga membuat para penerima manfaat salah mendapatkan informasi yang valid membuat adanya suatu kendala yaitu salah jadwal karena kecurangan yang mendapat bantuan dobel dengan begitu bantuan tidak tersalurkan karena adanya kendala tersebut.

> "salah tempat dan jadwal pembagian di kantor pos, ada yang diblokir karena mendapatkan bantuan dobel.bukan yang bersangkutan yang datang langsung ke kantor pos."(informan 2 wawancara 11 juni 2021)[49].

[48] Soedjatmoko Abipraja SE,MM, wawancara oleh penulis, 11 juni 2021
[49] Soedjatmoko Abipraja SE,MM, wawancara oleh penulis, 11 juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi sosial ekonomi di masyarakat dari data yang di dapat yang menerima dana bantuan sebanyak 15.171 penerima manfaat ada warga yang merasa dirinya pantas menerima bantuan sosial tetapi nyatanya tidak diberi bantuan

Menyatakan

> "iya mbak menurut saya layak karena suami saya juga baru di PHK pas corona itu ,ya kalo dikasih ya saya terima saja mbak lah kok saya tidak dapat malah tetangga saya dapat bantuan macam-macam mbak ada yang sembako, uang tapi saya ga dapat apa- apa padahal saya juga sekarang cuman jualan jajan dirumah.(informan 6 wawancara 8 juni 2021)[50]

Keterampilan dari para pelaksana menjadi kunci utama keberhasilan Implementasi kebijakan bantuan sosial tunai ini dikarenakan memang terorganisir dan tertata dengan baik dengan adanya loket

Menyatakan:

> "saat penerima manfaat datang ke kantor pos, merka akan datang kepetugas yang akan memverifikasi datanya lalu mendapatkan nomor danom yang disamakan di masing- masing loket jadi setiap loket tersebut terdapat petugas yang menangani -+ 300 penerima manfaat". (informan 3 wawancara 9 juni 2021)[51]

Koordinasi memang dilakukan oleh pihak dinas sosial kota surabaya dengan kantor pos karena koordinasi pihak instansi tersebut maka implementasi pun bisa berjalan karena memang setiap sebulan sekali ada rapat kerja.

[50] Sulasti, wawancara oleh penulis, 8 juni 2021.
[51] Bella Fitriyani, wawancara oleh penulis , 9 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyatakan

> "ada rapat koordinasi yang diadakan setiap sebulan sekali dan yang menhadiri adalah perwakilan dinsos, kantor pos, kecamatan dan kelurahan yang membahas terkait dengan penerimanya, kendala- kendalanya mulai dari verifikasi sampai penyalurannya" (infroman 1 wawancara 14 juni 2021)[52]

C. Analisis dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemic Covid -19 Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Kebijakan yakni sebuah rangkaian perilaku atau tindakan yang mencakup konsekuensi yang memang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang maupun kelompok atau pemerintah yang memang berisikan sebuah keputusan untuk mencapai suatu tujuan bersama.[53]

Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa implementasi kebijakan menurut mereka dimaknai dengan beberapa kata kunci yang pertama untuk menjalankan sebuah kebijakan, untuk melengkapi sebuah janji- janji dari sebuah kebijakan, untuk menghasilkan out put dari sebuah tujuan kebijakan , untuk menyelesaikan misi yang seharusnya diwujudkan dalam sebuah tujuan kebijakan.[54]

Teori Implementasi Van meter dan van horn menyatakan bahwa suatu proses implementasi mewujudkan abstarksi atas dikeluarkannya

[52] Edi siswanto, wawancara oleh penulis, 14 juni 2021
[53] Budi Winarno, teori Kbeijakan Publik (Pusat Antara Universitas Studi Sosial, Universitas Gadja Mada, Yogyakarta:1989),hlm.17
[54] Erwan Agus Prwanto, Ph.D, Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si, "*Implementasi Kbeijakan Publik*" , (Yogyakarta: Gava Media,2015),20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kebijakan yang pada dasarnya dilaksanakan untuk mendapatkan bentuk kinerja pelaksanaan kebijakan yang baik dalam hubungan variable-variable tertentu dan menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut. model ini mengindikasikan bahwa kebijakan bejalan sesuai dengan adanya suatu keputusan politik, yang menjadi pengaruh dalam kinerja kebijakan public dipengaruhi oleh beberapa hal yakni, ukuran tujuan, sumber daya, komunikasi, disposisi implementor, karakter lembaga, kondisi sosial, ekonomi serta politik.[55]

a. Standar atau Ukuran Tujuan Kebijakan

Kebijakan bantuan sosial tunai ini memang program dari pemerintah pusat yang berbentuk keputusan menteri sosial No 54 tahun 2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penangan dampak corona virus Disease 2019 (covid-19), sesuai dengan penjelasan dari Van metter dan Van Horn yang menyatakan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan adanya suatu keputusan politik dan begitulah muncul keputusan menteri sosial terkait bantuan sosial tunai tersebut. bisa dibilang kebijakan bantuan sosial ini sudah berjalan sesuai keputusan menteri yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak dari covid -19 dan berjalannya kebijakan tersebut juga ada kendala atau permasalahan dalam kebijakan tersebut.

[55] Leo Agustino, Dasar- Dasar kebijakan Publik (Bandung; Alfabeta,2009)hlm50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Daya

Dalam hal ini ada 3 sumber daya yaitu manusia, anggaran dan sarana prasarana. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud adalah para pelaksana mulai dari tingkat pusat yaitu kementrian sosial, dinas sosial, kantor pos, kecematan , kelurahan, RW, serta RT bisa dilihat dari masing- masing peranannya para sumber daya manusia tersebut turut andil dan berkomitmen atas tugas yang seharusnya di kerjakan.

Dan bapak edi siswanto menyatakan bahwa :

> "yang trut andil dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai yaitu kementerian sosial, dinas sosial, kantor pos, kecamatan, kelurahan, RW, RT dan memang tidak ada pelatihan semua sudah ada di petunjuk teknis di masing-masing instansi yang terkait"(informan 1 wawancara 14 juni 2021)[56]

Dilihat dari pernyataan beliau memang sumber daya manusia tersebut sangat penting karena ada andil dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan

Sumber daya anggaran atau keungan ini juga sangat penting karena memang bantuannya berupa uang tunai yang anggarannya dari kementerian sosial.

[56] Edi Siswanto, wawancara oleh penulis 14 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sumber daya sarana dan prasarana yaitu kantor pos yang sangat mempunyai andil yang cukup besar karena sebagai penyalur dana atau bantuan sosial tunai tersebut.

Dan pak edi siswanto pun selaku kepala seksi penangannan fakir miskin menyatakan:

> "penerima bantuan sosial tunai akan menerima surat undangan dari pihak RT setempat , dari undangan tersebut masyarakat diarahkan mengambil bantuan sosial ke kantor pos sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh kantor pos, undangan tersebut berisi barcode serta informasi dasar penerima bantuan dan wajib dibawa saat mengambil bantuan, setelah menunjukan undangan KTP/ KK petugas akan melakukan scanning barcode pada surat undangan, setelah itui maka dana bantuan sosial cair" (informan 1 wawancara 14 juni 2021) [57]

Dari penyataan narasumber tersebut membenarkan bahwa kantor pos adalah sara untuk penyaluran dana bantuan sosial yang berupa uang tunai kepada keluarga penerima manfaat.

c. Sikap para pelaksana

Dalam indicator sikap pelaksana terdapat dua hal yaitu inisiatif dan partisipatif, inisiatif yang dimaksud adalah para perwakilan pelaksana langsung terjun ke penyaluran dana di kantor pos masing- masing wilayah untuk mengetahu kenyataan yang ada di lapangan.

Seperti yang dikatakan bapak praja selaku kepala seksi kesejahteraan di kecamatan semampir menyatakan:

[57] Edi Siswanto, Wawancara oleh penulis 14 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "kecamatan memonitoring saat adanya pembagian bantuan tersebut"(informan 2 wawancara 11 juni 2021).

d. **Komunikasi**

Komunikasi memanglah sangat penting, dengan melakukan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut maka dapat berjalan dengan seimbang, bentuk komunikasi yang dilakukan adalah adanya rapat koordinasi dengan begitu maka komunikasi akan lancar dan informasi terkait dilapangan mudah untuk disampaikan dengan jelas dan akurat.

> "ada rapat koordinasi yang diadakan setiap sebulan sekali Dan yang hadir adalah perwakilan dinsos, kantor pos, kecamatan dan kelurahan membahas terkait dengan penerimanya, kendala- kendalanya mulai dari verifikasi sampai penyalurannya "(informan 1 wawancara 14 juni 2021) [58]

berbeda dengan komunikasi dengan penerima bantuan yang dilakukan tidak merata yang mengakibatkan ada dana yang tidak tersalur ke orang tersebut

> "tidak ada mbak saya tidak pernah di datangi par RT padahal saya juga pernah ke pak RT mengajukan biar dapet" (informan 6 wawancara 8 juni 2021)[59]

Bisa dilihat dari pernyataan ibu sulasti yang menyatakan tidak ada informasi atau komuniasi yang jelas yang membuat bingung mengapa tidak mendapatkan bantuan yang kenyataannya narasumber merasa layak mendapat bantuan

Hal ini terjadi karena komunikasi kepada penerima bantuan kurang maksimal.

[58] Soedjatmoko Abipraja SE,MM, wawancara oleh penulis, 11 juni 2021
[59] Sulasti, wawancara oleh penulis, 8 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Karakteristik lembaga pelaksana

Lembaga pelaksana bantuan ada beberapa dari kementerian sosial yang menjadi pusat dari data terpadu kesejahteraan sosial jadi lembaga tersebut yang memberikan data yang kemdian di verivikasi dari struktur terkecil yang meminta data kewarganya yang kemudian di stor untuk memvalidasi bahwa data tersebut sudah benar jadi yang turut andil yaitu mulai dari dinas sosial yang berkoordinasi dengan kantor pos dan struktur politik dari kecamatan keluarahan dan RW/RT masing- masing wilayah. Dari kementerian sosial dan dinas sosial memang karakteristik lembaganya yaitu mengedepankan kepentingan sosial seperti kesejahteraan masyarakat, kantor pos lembaga non pemerintah yang membantu penyaluran dana bantuan hal ini dikarenakan pemerintah percaya bahwa kantor pos mampu menyalurkan dana tanpa adanya kecurangan didalamnya.

f. Llingkungan ekonomi, sosial dan politik

Tingkat kemiskiskinan di kecamatan semampir memang cukup tinggi hal ini karena adanya perpindahan masyarakat desa ke kota yang diharapkan melalui kebijakan bantuan sosial tunai ini membantu masyarakat di kecamatan semampir untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti beras, karena tidak meratanya kebijakan bantuan ini di masyarakat membuat adanya kecemburuan sosial karena pernyataan dari narasumber yang tidak menerima bantuan menyatakan hal ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "ya kalo dikasih ya saya terima saja mbak lah kok saya tidak dapat malah tetangga saya dapat bantuan macam-macam mbak ada yang sembako, uang tapi saya ga dapat apa- apa padahal saya juga sekarang cuman jualan jajan dirumah"(informan 6 wawancara 8 Juni 2021)[60]

Dari pernyataan ibu sulasti tersebut ada sebuah kecemburuan sosial yang menganggap bahwa tidak ada keadilan yang sama dengan penerima bantuan di kawasannya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam sebuah implementasi kebijakan, tentu terdapat beberapa factor pendukung dan penghambat dari suatu implementasi kebijakan public. Factor pendukung implementasi kebijakan public memang harus didukung , dilaksanakan, diterima oleh masyarakat. Kebijakan dikatakan terealisasikan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan jika masyarakat mengikuti dan menaati aturan- aturan yang memang dibuat oleh pembuat kebijakan tanpa adanya hambatan- hambatan yang mengakibatkan suatu kebijakan public tidak optiman.[61]

Yang pertama adalah factor pendukung terlaksananya kebijakan bantuan sosial ini karena para pelaksana mengerjakan tugasnya sesuai petunjuk teknis dimasing- masing instansinya yang membuat terlaksananya sampai pencairan dana yang dilakukan di kantor pos.

[60] Sulasti, Wawancara oleh penulis 8 Juni 2021
[61] Sunggono, dkk, *Hukum dan kebijakan Publik* (Jakarta :PT Karya Unipress,1994), hlm.71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komunikasi yang dilakukan antara pihak pelaksana tetap berjalan dengan semestinya karena masih melakukan komunikasi meskipun rapat daring jadi tetap bisa mengontrol berjalannya kebijakan bantuan sosial tersebut.

Adapun factor penghambat dari kebijakan tersebut karena pada saat verifikasi data, data yang diberikan tidak sesuai karena penerima yang pindah rumah tetapi tidak melakukan konfirmasi di kelurahan karena hal tersebut bantuan tidak bisa dicairkan ke penerima manfaat.

Komunikasi antara pihak pelaksana dengan penerima kurang maksimal yang mengakibatkan ada orang yang seharusnya dapat tetepi malah tidak mendapat bantuan tersebut karena kurangnya sosialisasi ke masyarakatnya. Jadi saat bantuan sudah di implementasikan masih ada warga yang bingung mengapa tidak dapat bantuan padahal layak mendapatkan.

Pada saat penyaluran tidak membawa berkas secara lengkap yang membuat dana tidak bisa disalurkan dan karena pada saat mengambil dana bantuan ke kantor pos tidak mematuhi protocol kesehatan mulai dari tidak memakai masker dan tidak jaga jarak padahal semua yang terlibat di lapangan tersebut harus mematuhi protocol kesehatan supaya tidak ada yang tertular virus covid-19 ini.

Dilihat dari masalah dan kendala yang dihadapi dalam suatu kebijakan maka kebijakan tersebut belum optimal dalam pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan bantuan sosial tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan Semampir Kota Surabaya menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sangat relevan dengan permasalahan terkait bantuan sosial tunai di kecamatan Semampir yang di kategorikan dalam beberapa variable yang salimg terkait. Variable-variable tersebuta adalah standar ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik lembaga, komunikasi, sikap para pelaksana/ disposisi, lingkungan ekonomi, sosial serta politik.

   Dari standar ukuran yang ada yaitu dilihat dari keptusan menteri sosial No.54 tentang pelaksanaa bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (covid-19), sumberdaya yang dimaksud yaitu manusia yang berati para pelaksana dan sumber dana keuangan supaaya program tetap bisa berjalan dengan semestinya, karakteristik lembaga yang memang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya melalaui kebijakan program bantuan sosial tunai ini, komunikasi antara para pelaksana terus berjalan dengan baik sedangkan komunikasi yang dilakukan kepada para penerima tidak berjalan dengan baik karena masih ada orang yang tidak tau mengenai bantuan sosial tunai ini, sikap para pelaksana yaitu menjalankan tugasnya masing- masing sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada, kondisi sosial ekonomi yaitu adanya kecemburuan sosial saat tidak menerima bantuan karena merasa pantas mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Upaya yang diberikan dalam memberikan bantuan ini yaitu untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari adanya virus corona disease 2019 (covid-19) dengan memberikan bantuan sosial tunai sesuai dengan keputusan kementerian sosial diharapkan bantuan tersebut bisa membantu untuk memenuhi kebutuhuan dasar atau pokok. Kebijakan bantuan sosial tersebut pun memang mempunyai tujuan yang baik di bidang kesejahteraan masyarakatnya.

2. Factor pendukung dan pendorong hal yang mendorong terlaksananya program ini yaitu para pelaksana program tetap bekerja sesuai dengan standar operasional prosedurdan komunikasi yang dibangun antar pelaksana tetap berjalan meskipun melalui online tetap bisa melakukan rapat kerja.

   Dalam hal ini tidak semudah dalam pelaksanaanya karena ada tahap- tahap dalam menerima bantuan sosial tersebut dari verifikasi data pembagian undangan pencairan dana dan pembuatan laporannya terkait tahapan-tahapan tersebut pasti ada kendala yang terjadi mulai dari verifikasi datanya yang tidak sesuai dengan KTP karena alasan pindah rumah tanpa konfrmasi ke pihak kelurahan, pembagian undangan juga sama ada kendala saat penerima pindah rumah karena hal tersebut maka bantuan tidak bisa disalurkan dan kendala dilapangan saat penyaluran dana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak membawa berkas yang menjadi syarat pengambilan hal tersebut yang menjadikan implementasinya tidak optimal tetapi tetap berjalan.

1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut ini:

Untuk pelaksana kebijakan

Melakukan sosialisasi yang maksimal antara pihak pelaksana dengan penerima supaya tidak ada miss komunikasi yang mengakibatkan tidak meratanya bantuan sosial tunai ini dan supaya bantuan sosial tunaipun terealisasikan dengan tepat sasaran yaitu orang yang terkena dampak perekonomian karena covid-19 ini

Untuk penerima kebijakan

Mempunyai kesadaran diri untuk bertanya kepada pihak terkait supaya diberi penjelasan agar mengetahui secara jelas bagaimana bantuan sosial tunai ini bisa didapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2009) *Dasar- Dasar kebijakan Publik* Bandung:Alfabeta.

Agus, E,. dan Dyah Ratih Sulistyastuti.(2015). *Implementasi Kebiakan publik:Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*,Yogyakarta:Gava Media

Anggito, A. dan Johan Setiawan.(2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat:CV Jejak..

Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Unair Press.

Dwijowijoto, R.N.(2003) *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Haryanti, N.D.(2015) "*implementasi bantuan langsung tunai (BLT) di kecamatan TanjungPinang Barat kelurahan Bukit Cermin Kota TanjungPinang Tahun 2012",* mahasiswa pemerintahan, fisip umrah, TanjungPinang

Iping, B.(2020). Perlindungan social melalui kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) di era pandemic covid-19: tinjauan prespektif ekonomi social", publikasi oleh Universitas Ekasakti padang, *Jurnal maanajemen pendidikan dan ilmu social , Volume 1, Issue 2*.

Islamy, M.I.(2018). *Kebijakan Publik* . Banten: Universitas terbuka.

Islamy, M.I. (2001), *Prinsip- Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara,* Jakarta: Bumi Aksara.

Iqbal, H.(2008). *Implementasi kebijakan Program bantuan langsung tunai tahun 2008 dikabupaten kudus,*universitas Diponogoro semarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kariono, J. (2013). implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2008 di kabupaten Aceh Timu"r, *Universitas Sumatera utara (USU) medan Vol 3, No. 1.*

Moeloeng, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kulitatif. Bandung*: PT remaja Rosdakarya

Moleong, L.J.(2018) *metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nasution. (2003) *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Normanda, R., dan Diah Rahmawati.(2013), Identifiksi Faktor Penyebab Kemiskinan Kota Di Kecamatan Semampir Surabaya, *Jurnal Teknik POMITS Vol. 2, No. 1.*

Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Purwanto, E.A.dan Dyah Ratih Sulistyastuti.(2015). *Implementasi Kbeijakan Publik* Yogyakarta: Gava Media

Rahmat, J. (2000). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung:Remaja Rodakarya

Sarpano. (2020). *Bantuan Sosial Tunai kementerian Sosial bagi kelarga terdampak Cocid-19*, (Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial,2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekanto, S. (1983) *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Rineke Cipta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif*, Kualitatif, dan RAD. Bandung:Alfabeta

Suharto,E.(2020). *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabeta)

Suharto, E.(2020). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.* Bandung: Alfabeta.

susanti, S.(2016) Implementasi instruksi presiden republic Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) dikelurahan Sambutan kecamatan sambutan kota samarinda. *ejournal ilmu administrasi negara , 4, (2) 2016: 2795-2808, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.*

Syafi'I, A. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan* . Surabaya:Elkaf.

Wahab,S.A(2001). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*,edisi 2 Jakarta:Bumi Aksara.

Peraturan perundang- undangan

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54 Tahun 2020.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016.

Sumber sumber internet

Badan Pusat Statistic Kota Surabaya Kecamatan Semampir Dalam Angka 2020

http://camkoha.blogspot.com/2013/12/motto-skripsi-arab-dan-terjemahannya.html

https://www.e-semampir.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id